



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — iii

DAFTAR ISI — v

DAFTAR TABEL — ix

DAFTAR GAMBAR — xi

BAB I PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 1

- A. Implikasi Otonomi Daerah — 1
- B. Permasalahan Umum Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah — 2
- C. Tingginya KKN dalam Pelaksanaan APBD — 3
- D. Penyelewengan dana APBD — 5
- E. Belum Maksimalnya Kinerja — 6
- F. Daya Serap Anggaran yang Rendah — 6
- G. Temuan Pemeriksaan BPK dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah — 7

**BAB II GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH — 11**

- A. Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah — 11
- B. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah — 14
- C. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah — 15
- D. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah — 17
- E. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah — 19
- F. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah — 20
- G. Perencanaan dan Penganggaran
Keuangan Daerah — 21
- H. Pelaksanaan Keuangan Daerah — 30
- I. Penatausahaan Keuangan Daerah — 31
- J. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah. — 34
- K. Pengawasan Keuangan Daerah — 36

**BAB III PENTINGNYA *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 39**

- A. Pentingnya *Good governance* dalam
Pemerintahan — 39
- B. Mengapa *Good Governance* Perlu Diterapkan
di Indonesia — 47
- C. Tujuan dan Manfaat *Good Governance* — 52

BAB IV KONSEP *GOOD GOVERNANCE* — 55

- A. Pengertian *Government* dan *Governance* — 55
- B. Pengertian *Good Governance* — 58
- C. Pilar yang Membangun *Good Governance* — 62
- D. Fungsi Utama *Good Governance* — 65
- E. Tujuan *Good Governance* — 65

**BAB V PILAR DAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 71**

- A. Pilar dan Prinsip *Good Governance* dalam
Sektor Publik — 71
- B. Pilar dan Prinsip *Good Governance* dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah — 83

BAB VI REGULASI DAN KEBIJAKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 97

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara — 98
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara — 102
- C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara — 104
- D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan — 104
- E. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — 105

BAB VII PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA — 109

- A. Penerapan *Good Governance* di Pemerintahan — 109
- B. Penerapan *Good Governance* pada Pengelolaan Keuangan Daerah — 112
- C. Faktor yang Memengaruhi dalam Mewujudkan *Good Governance* — 114

BAB VIII REFORMASI BIROKRASI — 117

- A. Latar Belakang Perlunya Reformasi Birokrasi — 117
- B. Birokrasi sebagai Pelaksana Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat — 119
- C. Reformasi Birokrasi dalam Konsep *Good Governance* — 121
- D. Program Reformasi Birokrasi — 126
- E. Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019 — 130
- F. Peran Kepemimpinan Kepala Daerah — 133
- G. Peningkatan Sumber Daya Manusia — 134
- H. Reformasi Birokrasi Keuangan — 135

BAB IX	KAITAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DENGAN PELAYANAN PUBLIK — 139
A.	Kaitannya <i>Good Governance</i> dengan Pelayanan Publik — 139
B.	Penyebab Pentingnya Pelayanan Publik — 141
C.	Unsur-Unsur Pelayanan Publik — 142
D.	Asas-asas Pelayanan Publik — 143
E.	Prinsip Pelayanan Publik — 144
F.	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik — 146
BAB X	PROFIL PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA — 149
A.	Gambaran Umum Kota Tasikmalaya — 149
B.	Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kota Tasikmalaya — 151
C.	Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah — 163
D.	Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan — 167
E.	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah — 168
BAB XI	IMPLEMENTASI PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA TASIKMALAYA — 175
A.	Visionary, Wawasan ke Depan — 176
B.	Keterbukaan dan Transparansi — 178
C.	Akuntabilitas — 182
BAB XII	REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH — 205
A.	Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya — 205
B.	Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya — 208
	DAFTAR PUSTAKA — 209
	GLOSARIUM — 217
	INDEKS — 221
	TENTANG PENULIS — 223